

Pengaruh Kepemilikan Publik, Kompleksitas Operasi dan Komite Audit Terhadap Audit Delay

Thalia Loviana Cipta ¹⁾ Sophia Andini ²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: thalialovianacipta@yahoo.co.id

²⁾ Email: Sophia.andini@kalbis.ac.id

Abstract: The research aims to determine and analyze the influences of public ownership, complexity of operations and audit committee on audit delay. The population in research are all companies in the mining sector which were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2014-2018 period. The sampling technique uses purposive sampling which produces total sample of 26 companies with total research data of 130 observations. The research used multiple regression analysis with random effect approach model. The partial test results show that public ownership has positive influence on audit delay while complexity of operations and audit committee has no influence on audit delay.

Keywords: audit delay, public ownership, complexity of operations, audit committee

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan publik, kompleksitas operasi dan komite audit terhadap audit delay. Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 26 perusahaan dengan jumlah data penelitian sebesar 130 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan pendekatan model random effect. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan kompleksitas operasi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Kata Kunci: audit delay, kepemilikan publik, kompleksitas operasi, komite audit

I. PENDAHULUAN

Fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan menjadi perbincangan yang tak kunjung usai. Banyak emiten atau perusahaan publik dari berbagai sektor yang terlambat bahkan belum menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka. Hal ini membuat para emiten yang terlibat kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan harus menerima sanksi karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu kasus emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya yaitu PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Grup Bakrie. Dilansir

dari halaman media www.cnnindonesia.com (2015), perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2014 karena masih berjibaku dengan perhitungan utang. Total perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan periode 31 Desember 2016-2018 yaitu 28 perusahaan (www.idx.co.id). Bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau telah *go public* wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu

perusahaan yang menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh para pengguna laporan keuangan yaitu investor, kreditor, regulator, direktur dan setiap divisi dalam suatu perusahaan. Laporan yang telah disusun oleh manajemen kemudian akan diaudit oleh pihak eksternal yang independen yakni auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menghasilkan laporan audit terkait dengan penilaian kewajaran laporan keuangan.

Audit merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis terkait dengan laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar dan bebas dari salah saji yang material. Proses audit akan memakan waktu yang cukup lama karena panjangnya prosedur audit yang harus diikuti. Laporan audit akan digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit (Agoes, 2018, p. 7). Laporan tahunan harus disajikan secara tepat waktu agar informasi yang terkandung di dalamnya berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Rentang waktu penyelesaian audit dikenal dengan istilah *audit delay*.

Menurut Pratiwi (2018, p. 1), *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai diselesaikannya laporan audit oleh auditor. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Pasal 7 Ayat 1 menyatakan “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”.

Pratiwi (2018, p. 3) juga menyatakan bahwa semakin panjang *audit delay* maka akan memberikan dampak negatif kepada perusahaan karena akan

mengurangi nilai manfaat dari informasi yang terdapat pada laporan keuangan dan memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik seperti tingginya nilai utang dibandingkan aset, tingginya nilai piutang tak tertagih, kerugian penjualan. *Audit delay* dipengaruhi oleh berbagai faktor dari eksternal maupun internal. Salah satu faktor eksternalnya yaitu kepemilikan publik.

Menurut Syah (2017, p. 1804), kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Pihak yang memiliki saham disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham akan menerima pengembalian investasi berupa dividen yang dibagikan perusahaan tergantung jumlah dari persentase kepemilikan saham.

Syah (2017, p. 1805) juga menyatakan bahwa semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki publik maka akan meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan sehingga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan direspon melalui komentar ataupun kritik oleh para pemegang saham. Pihak manajemen akan berupaya untuk menyajikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dengan menuntut auditor independen untuk mempercepat proses audit sehingga informasi keuangan perusahaan dapat digunakan secara tepat waktu untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arfitra & Nurbaiti (2018, p. 2076) bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Persentase kepemilikan publik yang tinggi biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki kompleksitas operasi.

Menurut Darmawan & Widhiyani (2017, p. 260), kompleksitas operasi merupakan akibat dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah unit yang berbeda. Kompleksitas operasi

diukur dari adanya anak perusahaan yang dimiliki.

Darmawan & Widhiyani (2017, p. 274) juga menyatakan bahwa semakin kompleks suatu perusahaan, maka semakin banyak prosedur audit yang harus dilakukan sehingga menyebabkan *audit delay* semakin panjang sebab sebelum mengaudit perusahaan induk, perlu untuk mengaudit perusahaan anak terlebih dahulu. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi & Wiratmaja (2018, p. 1) serta Darmawan & Widhiyani (2017, p. 254) yaitu kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang kompleks memerlukan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan penyusunan laporan keuangan oleh sebab itu disetiap perusahaan dibutuhkan komite audit.

Menurut Eksandy (2017, p. 3), komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi mengevaluasi hasil audit, guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 menyatakan "Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik". Anggota komite audit harus berasal dari pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan agar independensi tetap terjaga. Selain itu, minimal satu anggota komite audit diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, p. 4).

Charlie & Apriwenni (2017, p. 118) juga menyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan maka

akan memperpendek *audit delay* karena banyaknya anggota komite membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Selain itu, karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari komite audit, maka dapat meminimalisir kesalahan yang material pada laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darmawan & Widhiyani (2017, p. 254) serta Charlie & Apriwenni (2017, p. 109) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Sektor pertambangan terpilih menjadi objek penelitian karena setiap tahun terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan tahunannya. Perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan tahunan periode 31 Desember 2014-2018 hingga terkena sanksi suspensi di antaranya PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) (www.bisnis.com, 2015), PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT. Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) (www.cnnindonesia.com, 2016), PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) (www.idx.co.id, 2017), PT. Aneka Tambang Tbk (APEX), dan PT. Cakra Mineral Tbk (CKRA) (www.idx.co.id, 2018). Selain itu, sektor pertambangan sedang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,71% (www.detik.com, 2019). Penurunan ini mengakibatkan pendapatan dan laba perusahaan menurun sehingga menimbulkan risiko bisnis yang tinggi. Tingginya risiko bisnis akan membuat auditor lebih berhati-hati dalam menyatakan opininya. Auditor akan melakukan proses audit yang lebih panjang untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat sehingga menyebabkan *audit delay*.

Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yaitu "Pengaruh Solvabilitas, Kepemilikan Publik, Auditor Switching dan Perusahaan Holding Terhadap Audit

Delay” oleh Syah (2017). Penelitian akan berfokus pada faktor-faktor dari sisi eksternal perusahaan yaitu kepemilikan publik serta sisi internal perusahaan yaitu kompleksitas operasi dan komite audit sebagai faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *audit delay* dengan tahun penelitian 2014-2018. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menggunakan judul “PENGARUH KEPEMILIKAN PUBLIK, KOMPLEKSITAS OPERASI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY*”.

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan publik, kompleksitas operasi dan komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*)

Signalling theory pertama kali dipopulerkan oleh Michael Spence melalui penelitiannya yang berjudul *Job Market Signalling* pada tahun 1973. Teori ini melibatkan 2 pihak yakni pihak manajemen sebagai pemberi sinyal dan pihak investor sebagai penerima sinyal. Pada intinya, teori pensinyalan membahas tentang pihak manajemen yang berupaya untuk memberikan informasi terkait kondisi perusahaan kepada investor agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor.

2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi membahas tentang hubungan antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajemen perusahaan) yang

terikat oleh kontrak. Menurut Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, Holmes (2010, p. 362) berdasarkan kontrak, *principal* mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent*. *Principal* sebagai pemberi modal mempercayakan modalnya untuk diolah oleh *agent*. *Agent* akan mempertanggung jawabkan hasil dari jasa yang diberikan dalam bentuk laporan keuangan.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban manajer atas jasa yang telah diberikannya. Menurut Hery (2016, p. 2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan.

4. Auditing

Audit merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis terkait dengan laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar dan bebas dari salah saji yang materi. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011, p. 110.1), tujuan *auditing* adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

5. Laporan Audit

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, p. 110.1).

6. Audit Delay

Menurut Pratiwi (2018, p. 1), *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai diselesaikannya laporan auditan oleh auditor. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016/Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 7 Ayat 1 menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Bagi perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan tahunan akan dikenakan sanksi. Sanksi keterlambatan akan dikenakan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi.

7. Kepemilikan Publik

Menurut Hidayati (2018, p. 465), publik adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

8. Kompleksitas Operasi

Berdasarkan pernyataan dari Darmawan & Widhiyani, (2017, p. 264), kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat langsung dari pembagian kerja dan pembentukan departemen yang

berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata. Kompleksitas operasi perusahaan dicerminkan melalui anak perusahaan atau entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan induk dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (Wendy, Rizal & Hartono, 2019, p. 37). Adanya entitas anak perusahaan menunjukkan semakin kompleksnya suatu perusahaan.

9. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 1 Ayat 1, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pada umumnya, komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Daniri, 2014, p. 250).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, p. 4).

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pertambangan periode 2014-2018 yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* masing-masing perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Variabel dependen dalam penelitian yaitu *audit delay* sedangkan variabel independen dalam penelitian terdiri dari kepemilikan publik, kompleksitas operasi dan komite audit. Berikut pembahasan terkait variabel dependen dan independen sebagai berikut:

- *Audit delay*

Menurut Pratiwi (2018, p. 1), *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai diselesaikannya laporan auditan oleh auditor. Semakin tinggi jumlah hari maka semakin panjang *audit delay*. Pengukuran *audit delay* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AD_{it} = TLAD_{it} - TTB_{it}$$

Keterangan:

AD_{it} : *audit delay* pada perusahaan i pada tahun t

$TLAD_{it}$: tanggal laporan audit dipublikasi atau ditandatangani auditor pada perusahaan i pada tahun t

TTB_{it} : tanggal tutup buku perusahaan i pada tahun t

- **Kepemilikan Publik**

Menurut Syah (2017) kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Semakin tinggi persentase kepemilikan publik maka semakin kecil kemungkinan terjadi *audit delay*. Pengukuran kepemilikan publik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KP_{it} = \frac{TSPUB_{it}}{TSP_{it}} \times 100\%$$

Keterangan:

KP_{it} : kepemilikan publik perusahaan i pada tahun t

$TSPUB_{it}$: total saham milik publik perusahaan i pada tahun t

TSP_{it} : total saham perusahaan i pada tahun t

- **Kompleksitas Operasi**

Menurut Darmawan & Widhiyani (2017, p. 264), kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat langsung dari pembagian kerja dan pembentukan departemen yang berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata. Perusahaan yang kompleks ditandai dengan adanya anak perusahaan. Semakin kompleks suatu perusahaan maka kemungkinan terjadi *audit delay* semakin tinggi. Pengukuran kompleksitas operasi menggunakan metode perhitungan *dummy* yakni dengan memberikan:

Angka 1 : untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan

Angka 0 : untuk perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan

- **Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 1 Ayat 1, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit wajib memiliki minimal 1 anggota yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, p. 4). Semakin tinggi persentase dari anggota komite audit yang berlatar belakang akuntansi maka semakin rendah kemungkinan terjadi *audit delay*. Pengukuran komite audit dirumuskan sebagai berikut:

Komite Audit =

$$\frac{\sum \text{Anggota komite audit yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan}}{\sum \text{Anggota komite audit}} \times 100$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	AD	KP	KOMP	KA
Mean	80.58462	0.336777	0.923077	0.591795
Max.	354.0000	0.853661	1.000000	1.000000
Min.	22.00000	0.023478	0.000000	0.000000
Std. Dev.	37.98771	0.170494	0.267500	0.295649
Obs.	130	130	130	130

Nilai rata-rata *audit delay* yaitu sebesar 80,58 atau sama dengan 81 hari. Nilai tertinggi sebesar 354 atau sama dengan 354 hari. Nilai terendah sebesar 22 atau sama dengan 22 hari. Nilai standar deviasi sebesar 37,98 lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *audit delay* tidak memiliki banyak varian data dalam penelitian.

Nilai rata-rata kepemilikan publik sebesar 0,3367 atau setara dengan 33,67%. Nilai tertinggi sebesar 0,8536 atau sama dengan 85,36%. Nilai terendah sebesar 0,0234 atau sama dengan 2,34%. Nilai standar deviasi sebesar 0,1704 atau setara dengan 17,04% lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata keseluruhan sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepemilikan publik tidak memiliki banyak varian data dalam penelitian.

Nilai rata-rata kompleksitas operasi sebesar 0,9230 atau sama dengan 92,3%. Nilai tertinggi sebesar 1. Nilai terendah sebesar 0. Nilai standar deviasi sebesar 0,2675 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa variabel kompleksitas operasi tidak memiliki banyak varian data dalam penelitian.

Nilai rata-rata komite audit yaitu sebesar 0,5917. Nilai tertinggi sebesar 1 atau sama dengan 100%. Nilai terendah sebesar 0 atau sama dengan 0%. Nilai standar deviasi sebesar 0,2956 atau setara dengan 29,56% lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa variabel komite audit tidak memiliki banyak varian data dalam penelitian.

B. Uji Asumsi Klasik

Penelitian menggunakan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk memastikan model regresi yang didapatkan tidak terdapat penyimpangan seperti ketidakkonsistenan dan bias. Selain itu, pengujian juga dilakukan sebagai syarat untuk menguji kelayakan data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian menggunakan 2 jenis pengujian dalam uji asumsi klasik yakni uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

- Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018, p. 107) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018, p. 107). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Centered VIF*. Apabila nilai *Centered VIF* lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Diketahui bahwa nilai *Centered VIF* setiap variabel lebih kecil dari 10 yakni kepemilikan publik sebesar 1,009968, kompleksitas operasi sebesar 1,007289, dan komite audit sebesar 1,008733. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi.

- Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018, p. 137) uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018, p. 137). Uji heterokedastisitas dalam penelitian menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. Apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* lebih rendah dari nilai signifikansi 0.05 maka ada masalah heterokedastisitas, Diketahui bahwa nilai probabilitas *Obs*R-Squared* lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0.0518. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model regresi.

C. Analisis Regresi Berganda

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	48.10720	24.03850	2.001256	0.0475
KP	89.79049	24.90310	3.605595	0.0004
KOMP	15.28946	22.91340	0.667271	0.5058
KA	-20.06655	12.24160	-1.639209	0.1037

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$AD_{it} = 48,10 + (89,79) KP_{it} + (15,28) KOMP_{it} + (-20,06) KA_{it} + \epsilon$$

D. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018, p. 97) koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) dapat dilihat dari nilai *Adjusted R-squared*.

Diketahui nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,093042 atau sama

dengan 9,30%. Hal ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 9,30% terhadap variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 90,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

E. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018, p. 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka, terdapat pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

- **Kepemilikan Publik**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik memiliki nilai t-statistik sebesar 3,605595 dan probabilitas sebesar 0,0004. Nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan t-hitung menunjukkan pengaruh positif maka H₁ ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

- **Kompleksitas Operasi**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompleksitas operasi memiliki nilai t-statistik sebesar 0,667271 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5058. Nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak yang berarti kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

- **Komite Audit**

Hasil pengujian menyatakan bahwa variabel komite audit memiliki nilai t-statistik sebesar -1,639209 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1037.

Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian yaitu: penelitian hanya menggunakan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan periode 2014-2018 sebagai sampel penelitian sehingga penelitian tidak dapat dijadikan acuan bagi keseluruhan perusahaan *go public* di sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, variabel yang digunakan hanya kepemilikan publik, kompleksitas operasi dan komite audit sebagai variabel independen sementara variabel lain tidak dibahas dan diteliti pada penelitian, ketersediaan laporan keuangan dan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tidak mencakup seluruh tahun penelitian, serta adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi pada periode penelitian yang menyebabkan terbatasnya akses untuk mendapatkan referensi dan penunjang lainnya untuk melakukan penelitian. Saran dari keterbatasan tersebut yaitu bagi peneliti

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi, sampel, variabel independen dan pengukuran yang berbeda dari penelitian serta bagi lembaga penyedia laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses atas keseluruhan laporan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agoes, S. (2018). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfitra, R. I., & Nurbaiti, A. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Delay (Kajian Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *E-Proceeding Of Management*, 5(2), 2069-2078.
- Arfitra, R. I., & Nurbaiti, A. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Delay (Kajian Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *E-Proceeding Of Management*, 5(2), 2069-2078.
- Charlie & Apriwenni, P. (2017). Pengaruh Spesialisasi Auditor, Kepemilikan Publik, Komite Audit, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 109-123.
- Daniri, M. A. (2014). *Lead By GCG*. Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.
- Darmawan, I. P. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Komite Audit Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.1, 254-282.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas dan Komite Audit Terhadap Audit Delay (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 1-15.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., Holmes, S. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. (2016). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayati, W. N. (2018). Pengaruh Audit Delay, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen, Financial Distress, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Publik Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur Go Public yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Bussines*, 1(4), 461-470.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia Stock Exchange. (2017). "Pengumuman: Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir Per 31 Desember 2016". [Online]. Diakses 14 Februari 2020 dari <https://www.idx.co.id/berita/pengumuman/>.
- Indonesia Stock Exchange. (2018). "Pengumuman: Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir Per 31 Desember 2017". [Online]. Diakses 14 Februari 2020 dari <https://www.idx.co.id/berita/pengumuman/>.
- Indonesia Stock Exchange. (2019). "Pengumuman: Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir Per 31 Desember 2018". [Online]. Diakses 14 Februari 2020 dari <https://www.idx.co.id/berita/pengumuman/>.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi. Jakarta.
- Pasopati, G. (2015). "Terlilit Utang, Bumi Resources Telat Rilis Laporan Keuangan". [Online]. Diakses 15 Februari 2020 dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408154929-92-45101/terlilit-utang-bumi-resources-telat-rilis-laporan-keuangan>.
- Pasopati, G. (2016). "Telat Sampaikan Lapkeu, BEI Suspensi Saham 18 Perusahaan". [Online]. Diakses 16 Februari 2020 dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160630145045-92-142141/telat-sampaikan-lapkeu-bei-suspensi-saham-18-perusahaan>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta.
- Pratiwi, C. I. E., & Wiratmaja, I. D. N. (2018). Pengaruh Audit Tenure dan Kompleksitas Operasi Terhadap Audit Delay Perusahaan Pertambangan Di BEI Tahun 2013-2016. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24.3, 1, 1964-1989.
- Pratiwi, D. S. (2018). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Audit Delay. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 2(1), 1-13.
- Sugianto, D. (2019). "Semua Sektor Industri Kuartal I-2019 Kinclong, Kecuali Tambang". [Online]. Diakses 28 Februari 2020 dari <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4652965/semua-sektor-industri-kuartal-i-2019-kinclong-kecuali-tambang>.
- Sukirno. (2015). "BEI Suspensi 6 Emiten. BORN, BUMI, BRAU Termasuk". [Online]. Diakses 16 Februari 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20150630/192/448571/bei-suspensi-6-emiten.-born-bumi-brau-termasuk>.
- Syah, E. S. M. (2017). Pengaruh Solvabilitas, Kepemilikan Publik, Auditor Switching dan Perusahaan Holding Terhadap Audit Delay. *Jom Vekon*, 4(1), 1801-1812.
- Wendy, I., Rizal, V., Hantono. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Industri Dasar dan Kimia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 35-48.